

LAPORAN KINERJA

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2017



KATA PENGANTAR

Segenap puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena tim penyusun Laporan Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017.

Penyusunan Laporan Kinerja ini dilakukan guna memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dijabarkan secara detail melalui Peraturan Menteri Negara PAN Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja adalah wujud pertanggungjawaban kinerja atas pencapaian target kinerja yang telah direncanakan. Target kinerja diukur berdasarkan indikator kinerja yang telah dirumuskan pada dokumen perencanaan RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melaporkan indikator kinerja pengurangan luas kawasan kumuh dan rehabilitasi rumah tidak layak.

Demikian laporan ini disusun sebagai akuntabilitas pelaksanaan kegiatan pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman.

Medan, Februari 2018

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA UTARA



Ir. IDA MARIANA, M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19601125 199203 2 001

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan laporan kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dinas PKP) Provinsi Sumatera Utara atas Penggunaan Anggaran. Pernyataan melaksanakan tugas tersebut telah dicantumkan dalam Perjanjian Kinerja yang ditandatangani pada awal pelaksanaan anggaran tahun 2017. Perjanjian Kinerja berisikan penugasan dari Gubernur Sumatera Utara kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara untuk melaksanakan program/kegiatan dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja juga sebagai komitmen penerima tugas untuk melaksanakan kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dinas PKP) Merupakan Pemisahan Urusan Perumahan hasil pemetaan Urusan Pemerintahan dari Dinas Penataan Ruang dan Permukiman (Tarukim). Pemetaan adalah pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Finalisasi Pemetaan SKPD di Provinsi Sumatera Utara di tetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Susunan Organisasi Dinas PKP di atur melalui Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016.

Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara telah dicantumkan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 23 Tahun 2017. Dinas Perumahan dan Kawasan Perkiman melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman antara lain Perumahan, Kawasan Permukiman, Penyelenggaraan PSU permukiman.

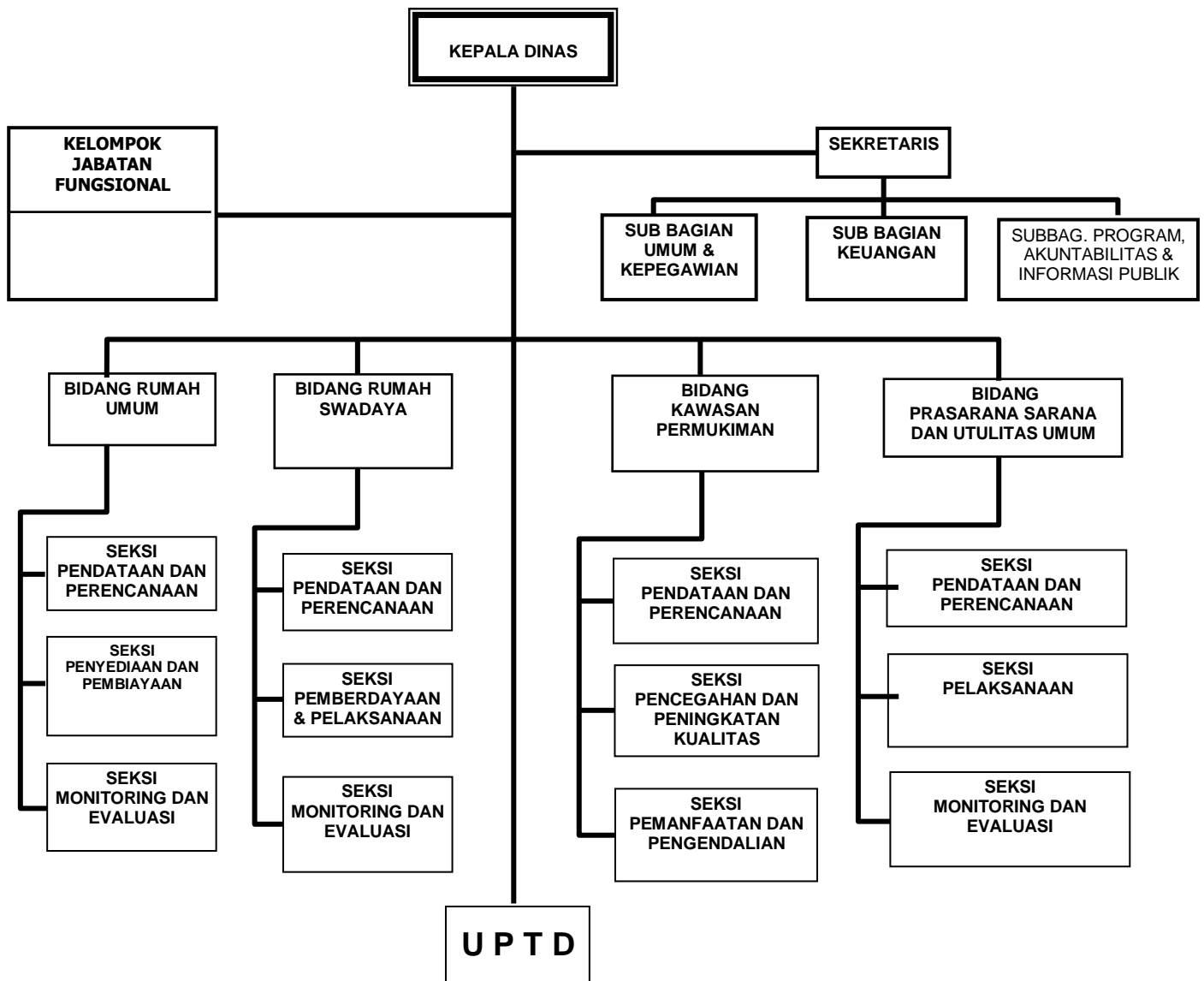
Kondisi kinerja pada sub urusan perumahan adalah belum tersedianya rumah yang layak bagi seluruh masyarakat. Rumah layak yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kesehatan dan tersedia kecukupan luas ruang perjiwa. Masih terdapat 192.000 unit rumah tidak layak huni yang belum ditangani. Penyediaan rumah bagi pengungsi korban bencana gunung Sinabung juga masih terkendala penyediaan lahan untuk pembangunannya.

Kinerja di kawasan permukiman diukur dari luas kawasan kumuh. Perkembangan jumlah penduduk dan urbanisasi membuat permukiman perkotaan semakin rentan menghadapi masalah kekumuhan. Pertumbuhan pusat – pusat permukiman yang belum memiliki pengaturan permukimannya mendorong munculnya kawasan kumuh baru. Saat ini lebih dari 7000 Ha kawasan permukiman dinyatakan sebagai kawasan kumuh sesuai penetapan kepala daerah kabupaten / kota se Sumatera Utara. Penanganan kawasan kumuh juga harus dari segala aspek, bukan hanya dari sektor Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman yang sudah kumuh tetapi juga mencegah turunnya kualitas permukiman agar tidak menjadi kawasan kumuh baru.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Susunan Organisasi Dinas PKP di atur melalui Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016. Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Dinas dibantu Sekretaris, Kepala Bidang Rumah Umum, Kepala Bidang Kawasan Permukiman, dan Kepala Bidang Prasarana Sarana dan Utilitas Umum, dan Kepala Bidang Rumah Swadaya.

Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada gambar 1;



Gambar 1. Struktur Organisasi
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara telah dicantumkan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 23 Tahun 2017. Dinas Perumahan dan Kawasan Perkiman melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman antara lain Perumahan, Kawasan Permukiman, Penyelenggaraan PSU permukiman.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan perumahan, kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman, prasarana dan sarana utilitas umum, sertifikasi kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman jalan dan jembaran, jasa konstruksi sesuai dengan bidang lingkupnya;
- b. melaksanakan kebijakan perumahan, kawasan permukiman, prasarana dan sarana utilitas umum, sertifikasi kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kaawasan permukiman jalan dan jembatan, jasa konstruksi sesuai dengan bidang lingkupnya;
- c. pelaksanaan evaluasi, perumahan dan kawasan permukiman kumuh, prasarana dan sarana utilitas umum, sertifikasi kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman jalan dan jembatan, jasa konstruksi sesuai dengan bidang lingkupnya;
- d. pelaksanaan administrasi perumahan, kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman kumuh, prasarana dan sarana utilitas umum, sertifikasi kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman jalan dan jembatan, jasa konstruksi sesuai dengan bidang lingkupnya;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai dengan tugasnya.

D. POTENSI SUMBER DAYA YANG ADA

1. Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara didukung oleh SDM, sampai dengan 31 Desember 2017 sebanyak 144 Orang yang terdiri atas;

• Pejabat Struktural	20	Orang
• Pejabat Fungsional	0	Orang
• Staf Administrasi	124	Orang
Jumlah		144 Orang

Komposisi SDM tersebut berdasarkan strata pendidikan / fungsional / jabatan dan golongan, yaitu:

Menurut Strata Pendidikan;

• S2	:	12	Orang
• S1	:	81	Orang
• D3	:	5	Orang
• SLTA	:	40	Orang
• SLTP	:	6	Orang
Jumlah		:	144 Orang

Menurut Fungsi/Jabatan Struktural;

• Kepala Dinas	:	1	Orang
• Sekretaris	:	1	Orang
• Kepala Bidang	:	3	Orang
• Kasi/Kasubbag	:	15	Orang
Jumlah		:	20 Orang

2. SARANA DAN PRASARANA UMUM/ASET

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak memiliki aset tetap tanah, maupun bangunan kantor. Aset yang dikelola/dikuasai sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 tercantum dalam tabel.1.

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan	Kecukupan Barang		Kondisi Barang	
				cukup	Kurang	Baik	Tidak Baik
1	Kendaraan Roda 4	8	Unit	-	√	7	1
2	Kendaraan Roda 2	11	Unit	-	√	5	6
3	Komputer	21	Unit	-	√	10	11
4	Laptop	15	Unit	-	√	9	6
5	Printer	19	Unit	-	√	19	-
6	Meja Biro	6	Buah	-	√	6	-
7	Meja 1/2 Biro	25	Buah	-	√	20	5
8	Meja Rapat	10	Buah	-	√	10	-
9	Meja Komputer	21	Buah	-	√	21	-
10	Meja Kursi dan Tamu	2	Set	-	√	2	-
11	Kursi Putar Besar	4	Buah	-	√	4	-
12	Kursi Putar Kecil	20	Buah	-	√	20	-
13	Kursi Kayu	-	-	-	-	-	-
14	Kursi Lipat	-	-	-	-	-	-
15	Kursi Plastik	-	-	-	-	-	-
16	Lemari 3 Pintu	1	Buah	-	√	1	-
17	Lemari 2 Pintu	-	-	-	-	-	-
18	Lemari Besi	-	-	-	-	-	-
19	Filling Kabinet	10	Unit	-	√	10	-
20	AC	6	Unit	-	√	6	-
21	Televisi	6	Unit	-	√	6	-
22	Mesin Penghancur Kertas	-	-	-	-	-	-
23	Faxmile	-	-	-	-	-	-
24	Infokus/Proyektor	6	Unit	√	-	6	-
25	Brankas	6	Unit	√	-	6	-
26	Soundsystem	2	Set	√	-	2	-
27	Handycam	2	Unit	√	-	2	-

28	Kamera Digital	12	Unit	√	-	12	-
29	Drone	5	Unit	√	-	5	-
30	Server	2	Unit	√	-	1	1
31	Meteran Dorong	9	Buah	√	-	-	-
32	Concrete Hammer Test	4	Buah	-	√	4	-

E. SISTIMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisikan tentang latar belakang penulisan laporan kinerja, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, potensi sumber daya manusia di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara.

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab ini berisikan tentang Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Dalam bab ini diuraikan mengenai capaian kinerja atas setiap pernyataan kinerja dengan melakukan analisis perbandingan target dan realisasi.

Bab IV Penutup

Dalam bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Distarukim, Permasalahan dan kendala serta strategi pemecahan masalah untuk tahun mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah merupakan ketetapan dan kesepakatan yang merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra Distarukimsu melalui berbagai kegiatan tahunan. Penetapan kinerja juga merupakan suatu kesanggupan dari penerima mandat untuk mewujudkan suatu capaian kinerja tertentu dengan sumber dana tertentu. Dalam Laporan Kinerja ini ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk Tahun Anggaran 2017 yang mencakup seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Indikator kinerja dan target kinerja disusun sesuai dengan indikator kinerja dan target kinerja pada Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018. Perjanjian kinerja ini merupakan komitmen bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk dapat mencapainya dalam tahun 2017. Penetapan Kinerja terdiri atas komponen sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja, program / kegiatan dan anggaran yang digunakan.

Komponen indikator kinerja yang bersumber dari indikator kinerja pada Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2013 – 2018 digunakan untuk mengukur tingkat capaian sasaran strategis. Indikator kinerja juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi dinas pada akhir periode Rencana Strategis. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator output maupun outcome program kegiatan setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai. Indikator kinerja pada Renstra Tahun 2013 - 2018 dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja kegiatan. Komponen Indikator kinerja sebagai berikut :

1. Rehabilitasi rumah tidak layak huni;
2. Luas kawasan kumuh;
3. Pembangunan PSU Permukiman MBR

Komponen Target dalam penetapan kinerja SKPD adalah target yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 sesuai dengan kegiatan pada program yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Komponen Program/Kegiatan dalam penetapan kinerja ini bertujuan untuk mencapai target kinerja.

A. Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Penataan Lingkungan Permukiman

Program ini memuat kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut:

1. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi.
2. Pembangunan PSU Permukiman MBR.
3. Pembangunan Infrastruktur Permukiman Relokasi Korban Bencana Provinsi.

B. Program Pembinaan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman

Program ini memuat kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut :

1. Fasilitasi Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota
2. Bantuan Stimulan untuk meningkatkan kualitas hunian
3. Pembinaan dan pengawasan pembangunan perumahan
4. Penyusunan NSPK, sosialisasi, penyuluhan dan publikasi bidang perumahan dan permukiman
5. Pilot proyek hari keluarga nasional

Komponen Anggaran adalah kemampuan pendanaan yang diadakan untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Untuk jelasnya penetapan kinerja lihat pada lampiran 1.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah bentuk pertanggungjawaban dinas atas keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diperjanjikan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2017 dalam rangka mendukung capaian visi dan misi Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Pertanggungjawaban ini disampaikan dalam bentuk Laporan Kinerja. Dalam laporan kinerja ini disampaikan hasil pengukuran, evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis dan target kinerja dalam Penetapan Kinerja. Target kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara tahun 2017 dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1

Target kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman	1. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	427 Unit
2	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan dan Pengembangan Infrastruktur Penataan Lingkungan Permukiman	1. Luas Kawasan Kumuh	1.292 Ha
		2. Pembangunan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum Perumahan MBR	3.000 Unit

A. Capaian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2017

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin jelek, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = (\text{Realisasi/Rencana}) \times 100 \%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan

rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Kemudian nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran sebagai berikut :

Interval Capaian Kinerja	Nilai
>85	Sangat Berhasil
70 – 85	Berhasil
55 – 70	Cukup Berhasil
< 55	Tidak Berhasil

Capaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara tahun 2017 disajikan dalam tabel 3.2.

Tabel 3.2
Capaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara tahun 2016

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi			Persentase	
							Kinerja		Anggaran	Kinerja	Anggaran
1	2	3		4	5	6	7		8	9	10
1	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Dan Pengembangan Infrastruktur Penataan Lingkungan Permukiman	1	Luas Kawasan Kumuh	1.292 Ha	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kabupaten /kota yaitu : Langkat, Binjai, Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Batu Bara, Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara, Tanjung Balai, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Mandailing Natal, Padang Sidempuan, Pematang Siantar, Simalungun, Samosir, Toba Samosir, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Tapanuli Tengah, Karo, Pakpak Bharat, Gunung Sitoli, Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan.	52.883.647.400	1.263	Ha	52.291.616.975	105,80 %	98,88 %
		2	Pembangunan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum Perumahan MBR	3.000 Unit	Pembangunan PSU Permukiman MBR di Provinsi Sumatera utara, yaitu : Langkat, Binjai, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Batubara, Asahan, Tanjung Balai, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Simalungun, Mandailing Natal dan Padang Lawas.	25.973.137.000	3.357	Unit	25.767.562.850	111,90 %	99,21 %
2	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Dan Pengembangan Perumahan Dan Permukiman	1	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	427 Unit	Rehabilitasi rumah tidak layak huni di Sumatera Utara, Pilot proyek pelaksanaan hari keluarga nasional	14.372.275.000	381	unit	12.183.212.300	89,23 %	84,77 %

Jumlah Anggaran Tahun 2017:	113.062.239.400,00
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.856.165.000,00
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5.369.171.000,00
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	585.000.000,00
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	473.500.000,00
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	715.484.000,00
7. Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Penataan Lingkungan Permukiman	80.481.744.400,00
8. Program Pembinaan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman	23.581.175.000,00

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2017 disajikan sebagai berikut :

Sasaran Strategis I : Tersedianya Prasarana Dan Sarana Kawasan Perumahan Dan Permukiman Di Sumatera Utara

IKU : 1. Luas Kawasan Kumuh (Ha)
2. Pembangunan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum Perumahan MBR (Unit)

NO	Program / Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase (%)
	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Penataan Lingkungan Permukiman			
1	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kabupaten /kota yaitu : Langkat, Binjai, Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Batu Bara, Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara, Tanjung Balai, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Mandailing Natal, Padang Sidempuan, Pematang Siantar, Simalungun, Samosir, Toba Samosir, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Tapanuli Tengah, Karo, Pakpak Bharat, Gunung Sitoli, Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan.	1.292 Ha	1.263 Ha	105,80 %
2	Pembangunan PSU Permukiman MBR di Provinsi Sumatera utara, yaitu : Langkat, Binjai, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Batubara, Asahan, Tanjung Balai, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Simalungun, Mandailing Natal dan Padang Lawas.	3.000 Unit	3.357 Unit	111,90 %

Luas kawasan kumuh pada awal Renstra adalah 1.792 Ha, target Luas Kawasan kumuh pada tahun 2017 adalah 1.292 Ha atau setara dengan pengurangan 500 Ha. Kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi kawasan kumuh adalah dengan melakukan pembangunan/penataan kawasan permukiman kumuh yang tersebar di 33 Kabupaten / kota se Sumatera Utara. Target pengurangan luas kawasan kumuh setiap tahun adalah 200 Ha. Luas kawasan kumuh yang tertangani pada tahun 2014 adalah 166 Ha, tahun 2015 49,52 ha dan tahun 2016 95,10 ha. Total penanganan selama tahun 2014 s/d 2016 adalah 310,62 Ha. Pada tahun 2017 dilakukan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di 28 Kabupaten

/kota yaitu : Langkat, Binjai, Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Batu Bara, Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara, Tanjung Balai, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Mandailing Natal, Padang Sidempuan, Pematang Siantar, Simalungun, Samosir, Toba Samosir, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Tapanuli Tengah, Karo, Pakpak Bharat, Gunung Sitoli, Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan. Area tertangani adalah 218,5 Ha. Luas kawasan kumuh tahun 2017 adalah 1.792 Ha di kurang akumulasi penanganan kawasan kumuh seluas 529 Ha yaitu 1.263 Ha

Sasaran Strategis II : Peningkatan Kualitas hunian dan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

IKU : 1. Rehabilitasi rumah tidak layak huni

NO	Program / Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase (%)
	Program Pembinaan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman			
1	Rehabilitasi rumah tidak layak huni di Sumatera Utara, Pilot proyek pelaksanaan hari keluarga nasional	427 Unit	381 Unit	89,23 %

Rehabilitasi rumah tidak layak huni dilaksanakan dilakukan dengan MoU kerjasama pembangunan oleh TNI sebanyak 347 Unit tersebar di Kabupaten Karo sebanyak 86 Unit, Kabupaten Tapanuli Selatan 86 Unit, Kabupaten Deli Serdang 85 Unit dan Kota Gunung Sitoli 90 Unit. Sedangkan dengan melalui pola pemberdayaan masyarakat di lokasi peringatan hari keluarga nasional dilaksanakan di Kabupaten Mandailing Natal 15 Unit, Kabupaten Tapanuli Tengah 14 Unit dan Kabupaten Nias Selatan 5 Unit.

B. Realisasi Anggaran

Dana atau anggaran yang teralokasi untuk belanja mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Tahun 2017 sumber dana APBD Provinsi sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut :

i.	Belanja Tidak Langsung	:	Rp. 37.469.572.000,-
ii.	Belanja Langsung	:	<u>Rp. 90.841.141.000,-</u>
	Total	:	Rp. 128.310.713.000,-

Pada pelaksanaannya kegiatan TA 2017, sesuai dengan hasil kesepakatan pada rapat evaluasi penggunaan anggaran di pemerintahan Provinsi Sumatera Utara, maka dilakukan perubahan anggaran yang ditujukan untuk melakukan penambahan pagu kegiatan untuk mencapai target RPJD yang masih jauh dari target akhir periode RPJMD 2013-2018. Perubahan dilakukan pada Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Perubahan – perubahan tersebut dibukukan pada P-APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 dan menjadi dasar penyusunan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dengan rincian belanja sebagai berikut :

i.	Belanja Tidak Langsung	:	Rp. 35.818.133.000,-
ii.	Belanja Langsung	:	<u>Rp. 113.062.239.400,-</u>
	Total	:	Rp. 148.880.372.400,-

Jumlah anggaran dan realisasi belanja langsung program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 3.3.

Tabel 3.3
Jumlah anggaran dan realisasi program dan kegiatan
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Pagu Awal	Pagu P-APBD 2017	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan		Sisa Rp
					(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ProvSU	91.029.641.000	113.062.239.400	97,55%	107.893.173.614	95,43%	5.169.065.786
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.902.125.000	1.856.165.000	100%	1.617.911.663	87%	238.253.337
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	19.680.000	19.680.000	100%	18.500.650	94,0%	1.179.350
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik	840.000.000	758.400.000	100%	577.637.175	76,2%	180.762.825
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	60.000.000	60.000.000	100%	59.991.500	100,0%	8.500
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	37.300.000	60.000.000	100%	59.996.700	100,0%	3.300
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	72.149.000	84.039.000	100%	80.800.800	96,1%	3.238.200
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	33.696.000	33.696.000	100%	33.695.150	100,0%	850
7	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	24.000.000	36.000.000	100%	23.940.000	66,5%	12.060.000
8	Penyediaan Makanan Dan Minuman	172.664.000	161.714.000	100%	137.609.000	85,1%	24.105.000
9	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	410.556.000	410.556.000	100%	394.187.058	96,0%	16.368.942
10	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah	232.080.000	232.080.000	100%	231.553.630	99,8%	526.370

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Pagu Awal	Pagu P-APBD 2017	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan		Sisa
					(Rp)	(%)	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4.229.960.000	5.369.171.000	100%	4.914.100.808	92%	455.070.192
11	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	141.400.000	141.400.000	100%	133.915.000	94,7%	7.485.000
12	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	1.513.800.000	2.025.511.000	100%	1.977.680.600	97,6%	47.830.400
13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1.951.800.000	2.357.800.000	100%	2.150.916.322	91,2%	206.883.678
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	322.960.000	328.960.000	100%	327.086.386	99,4%	1.873.614
15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	300.000.000	515.500.000	100%	324.502.500	62,9%	190.997.500
	Program peningkatan disiplin aparatur	585.000.000	585.000.000	100%	493.475.000	84%	91.525.000
16	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	585.000.000	585.000.000	100%	493.475.000	84,4%	91.525.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	473.500.000	473.500.000	100%	369.799.000	78%	103.701.000
17	Pendidikan dan Pelatihan Formal	473.500.000	473.500.000	100%	369.799.000	78,1%	103.701.000
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	733.070.000	715.484.000	100%	599.641.700	84%	115.842.300
18	Penyusunan Laporan Neraca Dan Sistim Pembukuan	123.800.000	60.400.000	100%	44.330.000	73,4%	16.070.000
19	Kegiatan Pembinaan Dan Pengelolaan Barang/Asset Dan Neraca Pada SKPD	132.000.000	129.600.000	100%	116.480.000	89,9%	13.120.000

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Pagu Awal	Pagu P-APBD 2017	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan		Sisa
					(Rp)	(%)	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
20	Pengembangan Pengelolaan Informasi SKPD dan Operasional PPID	177.170.000	177.170.000	100%	144.530.000	81,6%	32.640.000
21	Penyusunan LK Dan PK 2017	55.600.000	55.600.000	100%	30.060.000	54,1%	25.540.000
22	Monitoring Dan Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Distarukimsu Tahun 2017	159.500.000	207.714.000	100%	179.561.700	86,4%	28.152.300
23	Penyusunan Program Dan Kegiatan TA 2018	85.000.000	85.000.000	100%	84.680.000	99,6%	320.000
	Program pembinaan dan pengembangan infrastruktur penataan lingkungan permukiman	60.142.200.000	80.481.744.400	100%	79.621.116.173	99%	860.628.227
24	Pembangunan Infrastruktur Permukiman Relokasi Korban Bencana Provinsi Erupsi Gunung Sinabung di Kawasan Merek	2.000.000.000	66.500.000	100%	66.295.000	99,7%	205.000
25	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kab. Batu Bara	600.000.000	608.592.000	100%	606.714.000	99,7%	1.878.000
26	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kab. Samosir	1.000.000.000	1.068.646.000	100%	1.067.798.000	99,9%	848.000
27	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kab. Tapanuli Utara	600.000.000	724.273.000	100%	721.715.000	99,6%	2.558.000
28	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kab. Humbang Hasundutan	3.100.000.000	3.151.750.000	100%	3.144.275.000	99,8%	7.475.000

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Pagu Awal	Pagu P-APBD 2017	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan		Sisa
					(Rp)	(%)	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
29	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kab. Tapanuli Tengah	500.000.000	463.743.000	100%	462.918.000	99,8%	825.000
30	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kota Tanjung Balai	600.000.000	572.411.000	100%	570.723.000	99,7%	1.688.000
31	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kota Padang sidempuan	600.000.000	565.359.000	100%	561.879.000	99,4%	3.480.000
32	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Perbatasan Dairi Pakpak Barat	500.000.000	479.743.000	100%	475.667.000	99,2%	4.076.000
33	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kota Medan	1.650.000.000	1.725.832.000	100%	1.719.940.000	99,7%	5.892.000
34	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kab. Nias Barat	1.000.000.000	954.990.400	100%	951.068.400	99,6%	3.922.000
35	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kab. Nias Selatan	1.500.000.000	1.421.061.000	100%	1.418.297.600	99,8%	2.763.400
36	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kab. Deli Serdang	1.200.000.000	1.207.440.000	100%	1.189.103.750	98,5%	18.336.250
37	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kab. Labuhan Batu	500.000.000	506.520.000	100%	505.390.000	99,8%	1.130.000
38	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kab. Nias Utara	750.000.000	679.063.000	100%	674.617.000	99,3%	4.446.000
39	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kota Binjai	450.000.000	410.200.000	100%	404.531.000	98,6%	5.669.000

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Pagu Awal	Pagu P-APBD 2017	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan		Sisa
					(Rp)	(%)	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
40	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kab. Karo	1.750.000.000	1.640.763.000	100%	1.636.443.000	99,7%	4.320.000
41	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kab. Simalungun	3.000.000.000	2.760.685.000	100%	2.756.388.000	99,8%	4.297.000
42	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kab. Serdang Bedagai	1.000.000.000	1.016.880.000	100%	1.003.530.000	98,7%	13.350.000
43	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kab. Langkat	1.000.000.000	1.007.440.000	100%	993.288.375	98,6%	14.151.625
44	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kota Tebing Tinggi	750.000.000	701.952.000	100%	697.468.000	99,4%	4.484.000
45	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kota Pematang Siantar	1.000.000.000	948.904.000	100%	946.909.000	99,8%	1.995.000
46	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kab. Mandailing Natal	2.000.000.000	1.866.378.000	100%	1.865.708.000	100,0%	670.000
47	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kab. Padang Lawas Utara	1.000.000.000	937.638.000	100%	933.638.000	99,6%	4.000.000
48	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kab. Labuhan Batu Utara	500.000.000	496.996.000	100%	496.006.000	99,8%	990.000
49	Pembangunan PSU Permukiman PNS/ MBR Kab. Nias	500.000.000	478.579.000	100%	470.381.500	98,3%	8.197.500
50	Pembangunan PSU Permukiman Kab. Padang Lawas	500.000.000	487.801.000	100%	485.172.000	99,5%	2.629.000

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Pagu Awal	Pagu P-APBD 2017	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan		Sisa
					(Rp)	(%)	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
51	Pembangunan PSU Permukiman MBR Kab. Deli Serdang	8.100.000.000	8.361.783.000	100%	8.351.095.000	99,9%	10.688.000
52	Pembangunan PSU Permukiman MBR Kab. Serdang Bedagai	3.000.000.000	2.803.870.000	100%	2.775.640.000	99,0%	28.230.000
53	Pembangunan PSU Permukiman MBR Kab. Langkat	2.100.000.000	1.153.700.000	100%	1.136.230.000	98,5%	17.470.000
54	Pembangunan PSU Permukiman MBR Kota Tanjung Balai	1.500.000.000	1.447.689.000	100%	1.445.595.000	99,9%	2.094.000
55	Pembangunan PSU Permukiman MBR Kab. Labuhan Batu	1.500.000.000	1.446.819.000	100%	1.446.231.000	100,0%	588.000
56	Pembangunan PSU Permukiman MBR Kab. Labuhan Batu Selatan	1.000.000.000	936.276.000	100%	935.277.000	99,9%	999.000
57	Pembangunan PSU Permukiman MBR Kab. Labuhan Batu Utara	1.500.000.000	1.481.092.000	100%	1.480.307.000	99,9%	785.000
58	Pembangunan PSU Permukiman MBR Kab. Asahan	1.000.000.000	850.000.000	100%	848.423.750	99,8%	1.576.250
59	Pembangunan PSU Permukiman MBR Kab. Batu Bara	1.000.000.000	1.374.348.000	100%	1.370.988.500	99,8%	3.359.500
60	Pembangunan PSU Permukiman MBR Kab. Simalungun	750.000.000	746.300.000	100%	735.805.000	98,6%	10.495.000
61	Pembangunan PSU Permukiman MBR Kota Binjai	1.000.000.000	930.496.000	100%	922.633.500	99,2%	7.862.500
62	Koordinasi dan Perencanaan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi Sumatera Utara	265.500.000	265.500.000	100%	227.597.350	85,7%	37.902.650

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Pagu Awal	Pagu P-APBD 2017	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan		Sisa
					(Rp)	(%)	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
63	Monitoring, evaluasi dan Pengawasan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi Sumatera Utara	324.100.000	324.100.000	100%	317.690.000	98,0%	6.410.000
64	Koordinasi dan Perencanaan Pembangunan PSU Permukiman Provinsi Sumatera Utara	265.500.000	265.500.000	100%	230.218.000	86,7%	35.282.000
65	Monitoring, evaluasi dan Pengawasan Pembangunan PSU Permukiman Provinsi Sumatera Utara	287.100.000	401.120.000	100%	335.824.600	83,7%	65.295.400
66	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Lintas Pematang Siantar - Simalungun	1.000.000.000	933.074.000	100%	928.216.000	99,5%	4.858.000
67	Pembangunan PSU Permukiman MBR Kab. Mandailing Natal	1.000.000.000	933.084.000	100%	926.921.000	99,3%	6.163.000
68	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kab. Toba Samosir	1.000.000.000	918.262.000	100%	914.972.000	99,6%	3.290.000
69	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kab. Pakpak barat	1.000.000.000	926.191.000	100%	924.825.000	99,9%	1.366.000
70	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kab. Padang Lawas	1.000.000.000	1.163.630.000	100%	1.153.550.000	99,1%	10.080.000
71	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kab. Gunung Sitoli	1.000.000.000	972.099.000	100%	959.906.500	98,7%	12.192.500
72	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kab. Tapanuli Tengah	1.000.000.000	959.992.000	100%	909.002.000	94,7%	50.990.000

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Pagu Awal	Pagu P-APBD 2017	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan		Sisa
					(Rp)	(%)	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
73	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Kumuh Kabupaten Deli Serdang	-	7.177.040.000	100%	6.932.353.000	96,6%	244.687.000
74	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Kumuh Kabupaten Serdang Bedagai	-	7.974.540.000	100%	7.941.960.000	99,6%	32.580.000
75	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Kumuh Kota Medan	-	1.843.740.000	100%	1.807.152.000	98,0%	36.588.000
76	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Kumuh Kota Binjai	-	1.030.040.000	100%	1.001.344.000	97,2%	28.696.000
77	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Kumuh Kota Pematang Siantar	-	1.649.690.000	100%	1.642.144.000	99,5%	7.546.000
78	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Kumuh Kab. Labuhan Batu	-	828.490.000	100%	826.890.000	99,8%	1.600.000
79	Pembangunan Saranan dan Prasarana Perumahan MBR Kab. Labuhan Batu	-	1.041.740.000	100%	1.039.590.000	99,8%	2.150.000
80	Pembangunan Saranan dan Prasarana Perumahan MBR Kota Tanjung Balai	-	832.940.000	100%	831.230.000	99,8%	1.710.000
81	Penyusunan DED Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi Tahun 2018	-	1.103.620.000	100%	1.045.941.348	94,8%	57.678.652
82	Penyusunan DED Pembangunan PSU Permukiman MBR Tahun 2018	-	454.840.000	100%	449.700.000	98,9%	5.140.000
	Program pembinaan dan pengembangan perumahan dan permukiman	22.963.786.000	23.581.175.000	88,27%	20.277.129.270	86%	3.304.045.730
73	Pembuatan Stand Pameran pada Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) Medan Fair Tahun 2017	341.112.300	297.672.300	100%	297.672.300	100,0%	-

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Pagu Awal	Pagu P-APBD 2017	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan		Sisa
					(Rp)	(%)	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
74	Pembuatan Stand Pameran pada Pekan Lingkungan Hidup Indonesia di Jakarta dan Pameran Lingkungan Hidup Sumatera Utara di Medan Tahun 2017	325.480.000	283.615.000	100%	283.615.000	100,0%	-
75	Pembuatan Stand Pameran pada Pekan Inovasi Sumut 2017 dan Investment, Trade and Tourism of North Sumatera (ITT of North Sumatera) 2017	170.750.000	163.010.000	100%	163.010.000	100,0%	-
76	Penyuluhan bagi Masyarakat dalam rangka pemanfaatan budaya tinggal di Rumah Susun di Provsu	257.200.000	262.200.000	100%	238.727.900	91,0%	23.472.100
77	Pilot proyek pembangunan infrastruktur permukiman perdesaan di Desa Binaan PKK Provinsi Sumatera Utara	732.350.200	753.210.200	100%	746.593.200	99,1%	6.617.000
78	Workshop dan Sosialisasi Peringatan Hari habitat sedunia di provinsi sumatera utara	490.800.000	490.800.000	100%	460.871.750	93,9%	29.928.250
79	Koordinasi Pembangunan kegiatan Bidang Perumahan dan Permukiman di Provsu	229.085.000	229.085.000	100%	206.540.720	90,2%	22.544.280
80	Monitoring SPM Bidang Perumahan di Provsu	131.685.000	131.685.000	100%	120.869.000	91,8%	10.816.000
81	Sosialisasi Perancangan Kebijakan Penyediaan Kasiba dan Lisiba lintas Kab/Kota di Sumatera Utara	192.750.000	192.750.000	100%	191.448.000	99,3%	1.302.000
82	Realisasi Kesepakatan Penyediaan Kasiba dan Lisiba Litas Kab/Kota melalui penandatanganan MOU dan PKS antar Pemerintah Prov dan Kab/kota dan Unsur terkait bidang Perumahan	188.000.000	188.000.000	100%	165.837.100	88,2%	22.162.900
83	Rehabilitasi Rumah tidak layak huni diluar kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara	7.500.000.000	9.733.945.000	78,9%	7.591.627.200	78,0%	2.142.317.800

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Pagu Awal	Pagu P-APBD 2017	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan		Sisa
					(Rp)	(%)	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
84	Pilot Project Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dalam rangka dukungan Hari Keluarga Nasional	989.200.000	1.015.200.000	100%	971.121.100	95,7%	44.078.900
85	Pengembangan Kelembagaan Perumahan dan Kws.Permukiman (POKJA PKP)	195.314.000	200.314.000	100%	147.093.000	73,4%	53.221.000
86	Penyediaan Informasi Perumahan dan Kws. Permukiman (Penyediaan Rumah MBR, KPR, sistem Pembiayaan, Perbankan, Asosiasi Pengembang Perumahan, dll)	220.059.500	225.059.500	100%	223.461.500	99,3%	1.598.000
87	Identifikasi dan pemutakhiran data perumahan dan kawasan permukiman Provinsi Sumatera Utara	500.000.000	497.450.000	100%	386.857.500	77,8%	110.592.500
88	Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Pemukiman (RP3KP) di Provsu	1.500.000.000	1.493.126.000	100%	1.492.937.500	100,0%	188.500
89	Pembangunan Rumah Relokasi Pengungsi Gunung Sinabung	3.000.000.000	97.920.000	100%	96.530.000	98,6%	1.390.000
90	Penyusunan Profil Kawasan Kumuh di PKW Provinsi	2.500.000.000	2.451.619.000	100%	2.446.030.500	99,8%	5.588.500
91	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kepulauan nias Provinsi Sumatera Utara	3.500.000.000	3.623.130.000	100%	3.620.464.000	99,9%	2.666.000
92	Sosialisasi dan Pemantapan Rumah Tidak Layak Huni Pasca Pembangunan TA 2017	-	194.950.000	0%	-	0,0%	194.950.000
93	Penyusunan DED Rehabilitasi Rumah Tidak layak Huni Tahun 2018	-	445.000.000	0%	-	0,0%	445.000.000
94	Penyusunan DED Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni menjadi Home Stay Di kawasan Danau Toba	-	69.160.000	0%	-	0,0%	69.160.000
95	Penataan kawasan Kumuh dilokasi Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kab. Tapanuli Selatan	-	200.000.000	100%	199.290.000	99,6%	710.000

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Pagu Awal	Pagu P-APBD 2017	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan		Sisa
					(Rp)	(%)	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
96	Penataan kawasan Kumuh dilokasi Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kab. Deli Serdang	-	200.000.000	100%	199.188.000	99,6%	812.000
97	Monitoring, Evaluasi. Koordinasi Kegiatan Bidang Rumah Swadaya	-	142.274.000	100%	27.344.000	19,2%	114.930.000

Pada tabel 3.3 juga dapat dilihat terdapat kegiatan pembangunan dengan realisasi fisik dan keuangan 0 %, ini adalah kegiatan yang diaanggarkan pada perubahan APBD tahun 2017, tetapi tidak dilaksanakan karena waktu pelaksanaan yang tersedia tidak memadai.

BAB IV P E N U T U P

A. UMUM

Secara umum, pelaksanaan kegiatan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman baik fisik maupun non fisik Tahun Anggaran 2017 telah dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan kegiatan Tahun 2017 yang mencakup rencana kinerja, sasaran dan kinerja kegiatan telah dapat terlaksana secara menyeluruh.

B. PERMASALAHAN DAN KENDALA UTAMA

Dalam pelaksanaan kegiatan konstruksi dilapangan untuk memperoleh output kegiatan membutuhkan banyak sumber daya manusia yang sesuai dengan latar belakang pendidikan. Kantor dan SDM hanya terletak di Kota Medan sebagai Ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Hal tersebut menjadi hambatan untuk mengendalikan pelaksanaan konstruksi dilapangan.

C. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH UNTUK TAHUN MENDATANG

Upaya yang akan dilakukan dalam pemecahan masalah untuk tahun mendatang antara lain :

1. Masalah pembangunan fisik
 - a. Pelaksanaan survey lapangan yang lebih matang terhadap kondisi fisik lapangan pekerjaan, sehingga tidak menimbulkan kendala-kendala yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan fisik dilapangan. Untuk itu perlu dipersiapkan perencanaan matang terutama menyangkut teknis pelaksanaan serta aspek pembiayaan
 - b. Melaksanakan penelitian yang lebih matang tentang kesiapan lahan pelaksanaan fisik. Dalam hal ini perlu adanya kepastian serta jaminan dari masyarakat serta Pemerintah Daerah setempat tentang kesiapan pemanfaatan lahan yang diperlukan untuk pembangunan fisik.
 2. Masalah kelembagaan
 - a. Penugasan atau penempatan staf serta petugas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada bidang yang sesuai dengan keahlian dan pengalaman masing-masing
-

- b. Mengupayakan terbentuknya UPT sehingga mempersingkat rentang kendali pelaksanaan kegiatan.
- c. Melanjutkan kegiatan pembinaan-pembinaan yang diperlukan dalam upaya peningkatan kemampuan aparatur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- d. Intensifikasi koordinasi antar instansi dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara serta Pemerintah Kabupaten / Kota dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan yang mengakibatkan harus merubah lokasi pekerjaan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera ini kami sampaikan sebagai bentuk laporan pertanggung jawaban kami kepada pemberi Delegasi Wewenang.

LAMPIRAN

PENETAPAN KINERJA SKPD 2017

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Pagu Awal	Pagu P-APBD 2017	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan	
					(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7
	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ProvSU	91,029,641,000	113,062,239,400	97.55%	107,893,173,614	95.43%
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,902,125,000	1,856,165,000	100%	1,617,911,663	87%
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	19,680,000	19,680,000	100%	18,500,650	94.0%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik	840,000,000	758,400,000	100%	577,637,175	76.2%
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	60,000,000	60,000,000	100%	59,991,500	100.0%
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	37,300,000	60,000,000	100%	59,996,700	100.0%
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	72,149,000	84,039,000	100%	80,800,800	96.1%
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	33,696,000	33,696,000	100%	33,695,150	100.0%
7	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	24,000,000	36,000,000	100%	23,940,000	66.5%
8	Penyediaan Makanan Dan Minuman	172,664,000	161,714,000	100%	137,609,000	85.1%
9	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	410,556,000	410,556,000	100%	394,187,058	96.0%
10	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah	232,080,000	232,080,000	100%	231,553,630	99.8%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4,229,960,000	5,369,171,000	100%	4,914,100,808	92%
11	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	141,400,000	141,400,000	100%	133,915,000	94.7%
12	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	1,513,800,000	2,025,511,000	100%	1,977,680,600	97.6%

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Pagu Awal	Pagu P-APBD 2017	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan	
					(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7
13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1,951,800,000	2,357,800,000	100%	2,150,916,322	91.2%
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	322,960,000	328,960,000	100%	327,086,386	99.4%
15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	300,000,000	515,500,000	100%	324,502,500	62.9%
	Program peningkatan disiplin aparatur	585,000,000	585,000,000	100%	493,475,000	84%
16	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	585,000,000	585,000,000	100%	493,475,000	84.4%
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	473,500,000	473,500,000	100%	369,799,000	78%
17	Pendidikan dan Pelatihan Formal	473,500,000	473,500,000	100%	369,799,000	78.1%
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian	733,070,000	715,484,000	100%	599,641,700	84%
18	Penyusunan Laporan Neraca Dan Sistim Pembukuan	123,800,000	60,400,000	100%	44,330,000	73.4%
19	Kegiatan Pembinaan Dan Pengelolaan Barang/Asset Dan Neraca Pada SKPD	132,000,000	129,600,000	100%	116,480,000	89.9%
20	Pengembangan Pengelolaan Informasi SKPD dan Operasional PPID	177,170,000	177,170,000	100%	144,530,000	81.6%
21	Penyusunan LK Dan PK 2017	55,600,000	55,600,000	100%	30,060,000	54.1%
22	Monitoring Dan Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Distarukimsu Tahun 2017	159,500,000	207,714,000	100%	179,561,700	86.4%
23	Penyusunan Program Dan Kegiatan TA 2018	85,000,000	85,000,000	100%	84,680,000	99.6%
	Program pembinaan dan pengembangan infrastruktur penataan	60,142,200,000	80,481,744,400	100%	79,621,116,173	99%
24	Pembangunan Infrastruktur Permukiman Relokasi Korban Bencana Provinsi Erupsi Gunung Sinabung di Kawasan Merek	2,000,000,000	66,500,000	100%	66,295,000	99.7%
25	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kab. Batu Bara	600,000,000	608,592,000	100%	606,714,000	99.7%

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Pagu Awal	Pagu P-APBD 2017	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan	
					(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7
26	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kab. Samosir	1,000,000,000	1,068,646,000	100%	1,067,798,000	99.9%
27	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kab. Tapanuli Utara	600,000,000	724,273,000	100%	721,715,000	99.6%
28	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kab. Humbang Hasundutan	3,100,000,000	3,151,750,000	100%	3,144,275,000	99.8%
29	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kab. Tapanuli Tengah	500,000,000	463,743,000	100%	462,918,000	99.8%
30	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kota Tanjung Balai	600,000,000	572,411,000	100%	570,723,000	99.7%
31	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kota Padang sidempuan	600,000,000	565,359,000	100%	561,879,000	99.4%
32	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Perbatasan Dairi Pakpak Barat	500,000,000	479,743,000	100%	475,667,000	99.2%
33	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kota Medan	1,650,000,000	1,725,832,000	100%	1,719,940,000	99.7%
34	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kab. Nias Barat	1,000,000,000	954,990,400	100%	951,068,400	99.6%
35	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kab. Nias Selatan	1,500,000,000	1,421,061,000	100%	1,418,297,600	99.8%
36	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kab. Deli Serdang	1,200,000,000	1,207,440,000	100%	1,189,103,750	98.5%
37	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kab. Labuhan Batu	500,000,000	506,520,000	100%	505,390,000	99.8%
38	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kab. Nias Utara	750,000,000	679,063,000	100%	674,617,000	99.3%
39	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kota Binjai	450,000,000	410,200,000	100%	404,531,000	98.6%

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Pagu Awal	Pagu P-APBD 2017	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan	
					(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7
40	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kab. Karo	1,750,000,000	1,640,763,000	100%	1,636,443,000	99.7%
41	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kab. Simalungun	3,000,000,000	2,760,685,000	100%	2,756,388,000	99.8%
42	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kab. Serdang Bedagai	1,000,000,000	1,016,880,000	100%	1,003,530,000	98.7%
43	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kab. Langkat	1,000,000,000	1,007,440,000	100%	993,288,375	98.6%
44	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kota Tebing Tinggi	750,000,000	701,952,000	100%	697,468,000	99.4%
45	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kota Pematang Siantar	1,000,000,000	948,904,000	100%	946,909,000	99.8%
46	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kab. Mandailing Natal	2,000,000,000	1,866,378,000	100%	1,865,708,000	100.0%
47	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kab. Padang Lawas Utara	1,000,000,000	937,638,000	100%	933,638,000	99.6%
48	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kab. Labuhan Batu Utara	500,000,000	496,996,000	100%	496,006,000	99.8%
49	Pembangunan PSU Permukiman PNS/ MBR Kab. Nias	500,000,000	478,579,000	100%	470,381,500	98.3%
50	Pembangunan PSU Permukiman Kab. Padang Lawas	500,000,000	487,801,000	100%	485,172,000	99.5%
51	Pembangunan PSU Permukiman MBR Kab. Deli Serdang	8,100,000,000	8,361,783,000	100%	8,351,095,000	99.9%
52	Pembangunan PSU Permukiman MBR Kab. Serdang Bedagai	3,000,000,000	2,803,870,000	100%	2,775,640,000	99.0%
53	Pembangunan PSU Permukiman MBR Kab. Langkat	2,100,000,000	1,153,700,000	100%	1,136,230,000	98.5%
54	Pembangunan PSU Permukiman MBR Kota Tanjung Balai	1,500,000,000	1,447,689,000	100%	1,445,595,000	99.9%

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Pagu Awal	Pagu P-APBD 2017	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan	
					(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7
55	Pembangunan PSU Permukiman MBR Kab. Labuhan Batu	1,500,000,000	1,446,819,000	100%	1,446,231,000	100.0%
56	Pembangunan PSU Permukiman MBR Kab. Labuhan Batu Selatan	1,000,000,000	936,276,000	100%	935,277,000	99.9%
57	Pembangunan PSU Permukiman MBR Kab. Labuhan Batu Utara	1,500,000,000	1,481,092,000	100%	1,480,307,000	99.9%
58	Pembangunan PSU Permukiman MBR Kab. Asahan	1,000,000,000	850,000,000	100%	848,423,750	99.8%
59	Pembangunan PSU Permukiman MBR Kab. Batu Bara	1,000,000,000	1,374,348,000	100%	1,370,988,500	99.8%
60	Pembangunan PSU Permukiman MBR Kab. Simalungun	750,000,000	746,300,000	100%	735,805,000	98.6%
61	Pembangunan PSU Permukiman MBR Kota Binjai	1,000,000,000	930,496,000	100%	922,633,500	99.2%
62	Koordinasi dan Perencanaan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi Sumatera Utara	265,500,000	265,500,000	100%	227,597,350	85.7%
63	Monitoring, evaluasi dan Pengawasan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi Sumatera Utara	324,100,000	324,100,000	100%	317,690,000	98.0%
64	Koordinasi dan Perencanaan Pembangunan PSU Permukiman Provinsi Sumatera Utara	265,500,000	265,500,000	100%	230,218,000	86.7%
65	Monitoring, evaluasi dan Pengawasan Pembangunan PSU Permukiman Provinsi Sumatera Utara	287,100,000	401,120,000	100%	335,824,600	83.7%
66	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Lintas Pematang Siantar - Simalungun	1,000,000,000	933,074,000	100%	928,216,000	99.5%
67	Pembangunan PSU Permukiman MBR Kab. Mandailing Natal	1,000,000,000	933,084,000	100%	926,921,000	99.3%
68	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kab. Toba Samosir	1,000,000,000	918,262,000	100%	914,972,000	99.6%

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Pagu Awal	Pagu P-APBD 2017	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan	
					(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7
69	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kab. Pakpak Bharat	1,000,000,000	926,191,000	100%	924,825,000	99.9%
70	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kab. Padang Lawas	1,000,000,000	1,163,630,000	100%	1,153,550,000	99.1%
71	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kab. Gunung Sitoli	1,000,000,000	972,099,000	100%	959,906,500	98.7%
72	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kab. Tapanuli Tengah	1,000,000,000	959,992,000	100%	909,002,000	94.7%
73	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Kumuh Kabupaten Deli Serdang	-	7,177,040,000	100%	6,932,353,000	96.6%
74	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Kumuh Kabupaten Serdang Bedagai	-	7,974,540,000	100%	7,941,960,000	99.6%
75	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Kumuh Kota Medan	-	1,843,740,000	100%	1,807,152,000	98.0%
76	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Kumuh Kota Binjai	-	1,030,040,000	100%	1,001,344,000	97.2%
77	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Kumuh Kota Pematang Siantar	-	1,649,690,000	100%	1,642,144,000	99.5%
78	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Kumuh Kab. Labuhan Batu	-	828,490,000	100%	826,890,000	99.8%
79	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perumahan MBR Kab. Labuhan Batu	-	1,041,740,000	100%	1,039,590,000	99.8%
80	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perumahan MBR Kota Tanjung Balai	-	832,940,000	100%	831,230,000	99.8%
81	Penyusunan DED Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi Tahun 2018	-	1,103,620,000	100%	1,045,941,348	94.8%
82	Penyusunan DED Pembangunan PSU Permukiman MBR Tahun 2018	-	454,840,000	100%	449,700,000	98.9%
	Program pembinaan dan pengembangan perumahan dan	22,963,786,000	23,581,175,000	88.27%	20,277,129,270	86%
73	Pembuatan Stand Pameran pada Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) Medan Fair Tahun 2017	341,112,300	297,672,300	100%	297,672,300	100.0%

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Pagu Awal	Pagu P-APBD 2017	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan	
					(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7
74	Pembuatan Stand Pameran pada Pekan Lingkungan Hidup Indonesia di Jakarta dan Pameran Lingkungan Hidup Sumatera Utara di Medan Tahun 2017	325,480,000	283,615,000	100%	283,615,000	100.0%
75	Pembuatan Stand Pameran pada Pekan Inovasi Sumut 2017 dan Investment, Trade and Tourism of North Sumatera (ITT of North Sumatera) 2017	170,750,000	163,010,000	100%	163,010,000	100.0%
76	Penyuluhan bagi Masyarakat dalam rangka pemanfaatan budaya tinggal di Rumah Susun di Provsu	257,200,000	262,200,000	100%	238,727,900	91.0%
77	Pilot proyek pembangunan infrastruktur permukiman perdesaan di Desa Binaan PKK Provinsi Sumatera Utara	732,350,200	753,210,200	100%	746,593,200	99.1%
78	Workshop dan Sosialisasi Peringatan Hari habitat sedunia di provinsi sumatera utara	490,800,000	490,800,000	100%	460,871,750	93.9%
79	Koordinasi Pembangunan kegiatan Bidang Perumahan dan Permukiman di Provsu	229,085,000	229,085,000	100%	206,540,720	90.2%
80	Monitoring SPM Bidang Perumahan di Provsu	131,685,000	131,685,000	100%	120,869,000	91.8%
81	Sosialisasi Perancangan Kebijakan Penyediaan Kasiba dan Lisiba lintas Kab/Kota di Sumatera Utara	192,750,000	192,750,000	100%	191,448,000	99.3%
82	Realisasi Kesepakatan Penyediaan Kasiba dan Lisiba Litas Kab/Kota melalui penandatanganan MOU dan PKS antar Pemerintah Prov dan Kab/kota dan Unsur terkait bidang Perumahan	188,000,000	188,000,000	100%	165,837,100	88.2%
83	Rehabilitasi Rumah tidak layak huni diluar kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara	7,500,000,000	9,733,945,000	78.9%	7,591,627,200	78.0%
84	Pilot Project Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dalam rangka dukungan Hari Keluarga Nasional	989,200,000	1,015,200,000	100%	971,121,100	95.7%
85	Pengembangan Kelembagaan Perumahan dan Kws.Permukiman (POKJA PKP)	195,314,000	200,314,000	100%	147,093,000	73.4%
86	Penyediaan Informasi Perumahan dan Kws. Permukiman (Penyediaan Rumah MBR, KPR, sistem Pembiayaan, Perbankan, Asosiasi Pengembang Perumahan, dll)	220,059,500	225,059,500	100%	223,461,500	99.3%
87	Identifikasi dan pemutakhiran data perumahan dan kawasan permukiman Provinsi Sumatera Utara	500,000,000	497,450,000	100%	386,857,500	77.8%

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Pagu Awal	Pagu P-APBD 2017	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan	
					(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7
88	Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Pemukiman (RP3KP) di Provsu	1,500,000,000	1,493,126,000	100%	1,492,937,500	100.0%
89	Pembangunan Rumah Relokasi Pengungsi Gunung Sinabung	3,000,000,000	97,920,000	100%	96,530,000	98.6%
90	Penyusunan Profil Kawasan Kumuh di PKW Provinsi	2,500,000,000	2,451,619,000	100%	2,446,030,500	99.8%
91	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kepulauan nias Provinsi Sumatera Utara	3,500,000,000	3,623,130,000	100%	3,620,464,000	99.9%
92	Sosialisasi dan Pemantapan Rumah Tidak Layak Huni Pasca Pembangunan TA 2017	-	194,950,000	0%	-	0.0%
93	Penyusunan DED Rehabilitasi Rumah Tidak layak Huni Tahun 2018	-	445,000,000	0%	-	0.0%
94	Penyusunan DED Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni menjadi Home Stay Di kawasan Danau Toba	-	69,160,000	0%	-	0.0%
95	Penataan kawasan Kumuh dilokasi Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kab. Tapanuli Selatan	-	200,000,000	100%	199,290,000	99.6%
96	Penataan kawasan Kumuh dilokasi Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kab. Deli Serdang	-	200,000,000	100%	199,188,000	99.6%
97	Monitoring, Evaluasi. Koordinasi Kegiatan Bidang Rumah Swadaya	-	142,274,000	100%	27,344,000	19.2%